



Tanda_Terima_L...



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : NURJUMAATUN AGUSTINAH
NIK : 6103016208690001
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA SURABAYA
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 3 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkp@kpk.go.id | <https://elhkp.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2026-01-23 08:58:31





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURJUMAATUN AGUSTINAH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 60189

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 714 m2/240 m2 di KAB / KOTA SUMENEP, Rp. 2.200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	198.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA GEAR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
4. MOTOR, BEAT INJEKSI Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	716.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	343.558.017
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.458.258.017
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.458.258.017

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 informasi@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-12215/CT/KPP.2407/2026
Tanggal	: 10 Februari 2026
NPWP	: 6103016208690001
Nama Wajib Pajak	: NUR JUMAATUN AGUSTINAH
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 10 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.